

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 24 Februari 2022, Rusia meluncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina, mengklaim tindakan tersebut sebagai operasi militer khusus untuk mempertahankan kepentingan keamanan Rusia. Perang tersebut merupakan konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II (Harding, 2022). Akibat perang tersebut, banyak warga Ukraina yang terpaksa meninggalkan tempat asal mereka dan mengungsikan diri ke wilayah lain seperti Polandia

Menurut data *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, terdapat setidaknya 6,5 juta pengungsi asal Ukraina yang menyebar di seluruh dunia. Sementara itu, 6 juta diantaranya menyebar di wilayah Eropa. Konflik bersenjata yang terjadi menyebabkan gelombang besar pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Polandia (Zawadzka-Paluckta, 2024).

Grafik 1. 1 Jumlah pengungsi Ukraina yang menyeberang perbatasan

Country	Data Date	Refugees from Ukraine recorded in country as of date ⁽¹⁾	Refugees from Ukraine who applied for Asylum, TP or similar national protection schemes to date ⁽²⁾	Border crossings from Ukraine since 24 February 2022 ⁽⁴⁾	Border crossings to Ukraine since 24 February 2022 ⁽⁵⁾
Bulgaria	30/06/2024	62,700	190,310	Not applicable	Not applicable
Czech Republic	02/06/2024	353,510	615,235	Not applicable	Not applicable
Estonia	30/06/2024	35,915	60,460	Not applicable	Not applicable
Hungary	05/08/2024	60,620	44,625	5,288,490	4,692,545
Latvia	21/05/2024	48,460	55,175	Not applicable	Not applicable
Lithuania	05/07/2024	43,905	87,505	Not applicable	Not applicable
Poland	11/06/2024	957,505	1,802,670	21,388,745	19,498,565
Republic of Moldova	04/08/2024	123,295	56,025	1,152,480	888,900
Romania	21/07/2024	77,900	173,335	4,951,795	4,227,880
Slovakia	04/08/2024	122,925	148,795	2,516,815	2,417,855
Total		1,886,735	3,234,135	35,298,325	31,725,745

(UNHCR, 2024)

Menurut data UNHCR diatas, terdapat setidaknya 950.000 pengungsi asal Ukraina sejak invasi Rusia dimulai sejak Februari 2022 hingga Juni 2024. Polandia

adalah negara dengan jumlah pengungsi asal Ukraina terbanyak kedua setelah Jerman (UNHCR, 2024).

Sebelum invasi Rusia terhadap Ukraina, Polandia menerapkan kebijakan yang ketat terhadap penerimaan pengungsi, terutama bagi mereka yang berasal dari negara-negara di luar Uni Eropa (UE). Kebijakan tersebut mencakup proses penerimaan yang rumit dan batasan ketat terhadap jumlah pengungsi yang diterima (Ivan Franko et al., 2023). Selain itu, Polandia juga secara konsisten menegaskan keterbatasan penerimaan pengungsi, dengan menjaga kedaulatan perbatasannya dan mengontrol arus migrasi yang masuk. Namun, sejak tahun 2022, invasi Rusia terhadap Ukraina mengubah dinamika politik dan kemanusiaan di kawasan tersebut secara dramatis (Konstantinov et al., 2023; Szeptycki, 2024). Polandia yang awalnya bersikap negatif pada pengungsi Suriah pada tahun 2015 tidak memberi dukungan infrastruktur maupun politik (Friedman, 2024) bergeser pada saat pengungsi Ukraina datang dengan memobilisasi bantuan seperti tempat tidur, makanan dan bantuan medis (livingstone, 2022)

Banyaknya jumlah pengungsi Ukraina yang mencari suaka ke Polandia menjadi tantangan besar bagi negara Polandia. Infrastruktur penerimaan pengungsi yang ada tidak memadai untuk menangani jumlah yang begitu besar dalam waktu singkat (Duszczek & Kaczmarczyk, 2022). Para pengungsi Ukraina membutuhkan tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan lainnya. Kondisi mendesak Polandia untuk meninjau kembali kebijakannya terkait penerimaan pengungsi. Untuk menghadapi krisis kemanusiaan yang berkembang, Polandia merelaksasi kebijakannya terhadap pengungsi Ukraina.

Pada bulan Maret 2022, Presiden Republik Polandia Andrzej Duda menandatangani aturan yang mengubah undang-undang mengenai bantuan terhadap warga negara Ukraina terkait dengan konflik bersenjata di wilayah negara Ukraina. Kebijakan yang berlaku pada tanggal 26 Maret 2022 tersebut meliputi; 1) dapat memperoleh nomor *Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności* (PESEL) untuk mengakses layanan publik dan profil online, 2) bekerja di Polandia dengan pemberi kerja yang diwajibkan untuk memberi tahu kantor tenaga kerja, 3) memiliki akses ke tunjangan sosial, perawatan kesehatan, dan kegiatan ekonomi atas dasar yang sama dengan warga negara Polandia. Ketentuan hukum tidak berlaku untuk warga negara Ukraina yang telah memiliki status atau dokumen hukum tertentu, termasuk mereka yang memiliki tempat tinggal resmi di Polandia, pemegang visa nasional atau izin tinggal sementara yang telah diperpanjang oleh hukum, dan mereka yang memiliki nomor PESEL dan akses ke layanan publik. Orang-orang tersebut sudah tercakup dalam kerangka hukum yang ada dan tidak memerlukan warga negara Ukraina yang melarikan diri dari perang dapat tinggal di Polandia secara legal selama 18 bulan sejak 24 Februari 2022, dan dapat mengajukan permohonan izin tinggal sementara setelah 9 bulan. ketentuan tambahan yang disediakan oleh undang-undang baru (Gov Pl, 2022).

1.2 Tinjauan Literatur

Berikut adalah tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan topik relaksasi kebijakan luar negeri Polandia terhadap pengungsi Ukraina pada tahun 2022-2024. Pertama, yaitu penelitian dengan judul "*The Transformation of Polish-Ukrainian Relations in the Context of Migration Policy Implementation*" (Ivan Franko et al.,

2023). Penelitian tersebut menemukan bahwa sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Polandia menerapkan kebijakan penerimaan pengungsi yang ketat, dengan proses yang rumit dan batasan jumlah pengungsi yang diterima. Namun, invasi Rusia menyebabkan gelombang besar pengungsi Ukraina yang mencari perlindungan di Polandia. Penelitian tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Polandia dalam menangani krisis pengungsi tersebut, termasuk tekanan pada infrastruktur penerimaan pengungsi dan kebutuhan mendesak untuk merelaksasi kebijakan penerimaan.

Kedua yaitu penelitian dengan judul "*The outbreak of the 2022 Russo-Ukrainian war: mental health of poles and their attitude to refugees*" (Babicki et al., 2023). Penelitian tersebut menyelidiki dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap kebijakan migrasi di Polandia. Penelitian menemukan bahwa konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah mengubah lanskap migrasi di kawasan tersebut secara signifikan. Gelombang besar pengungsi Ukraina yang memasuki Polandia mendorong pemerintah Polandia untuk mempertimbangkan ulang kebijakan migrasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polandia mulai merelaksasi kebijakannya terhadap pengungsi Ukraina sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang berkembang.

Ketiga yaitu penelitian yang berjudul "*Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi*" (Anandita et al., 2019). Penelitian Anandita menyelidiki tentang respons kebijakan luar negeri Polandia dalam menghadapi permasalahan seperti penolakan masuknya imigran dari luar Eropa dan tekanan dari UE untuk mengisi kuota imigran. Tidak hanya itu,

penelitian tersebut juga membahas faktor dan penyebab dari perubahan kebijakannya.

Ketiga penelitian tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks kebijakan migrasi di Polandia, dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap kebijakan migrasi, serta respons pemerintah Polandia terhadap krisis pengungsi Ukraina. Hasil-hasil tersebut memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut tentang relaksasi kebijakan Polandia terhadap penerimaan pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia tahun 2022.

Ketiga penelitian tersebut memberikan wawasan penting mengenai kebijakan migrasi Polandia, namun terdapat beberapa "research gap" yang perlu diperhatikan. Penelitian Ivan Franko et al. (2023) dan Babicki et al. (2023) menyoroti perubahan kebijakan Polandia dalam merespons krisis pengungsi Ukraina, terutama dalam konteks invasi Rusia pada tahun 2022. Namun, keduanya lebih fokus pada aspek kebijakan dan tantangan infrastruktur tanpa membahas secara mendalam dampak sosial-politik jangka panjang dari relaksasi kebijakan tersebut terhadap hubungan bilateral Polandia-Ukraina dan dinamika domestik Polandia. Sementara itu, penelitian Anandita et al. (2019) mengkaji kebijakan Polandia terhadap migran ekonomi dan pengungsi secara lebih luas, namun tidak mengaitkannya secara spesifik dengan situasi yang dihasilkan oleh konflik bersenjata seperti yang dibahas dalam penelitian yang lebih baru. Dengan demikian, "research gap" yang dibahas skripsi ini adalah terletak pada belum adanya yang mengkaji faktor-faktor domestik dan internasional secara komprehensif dengan menggunakan teori *Windows of Change* mengenai perubahan kebijakan yang dipicu

oleh krisis seperti invasi Rusia mempengaruhi kebijakan migrasi Polandia dalam konteks yang lebih luas, termasuk dinamika politik internal dan hubungan regional.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan Polandia merelaksasi kebijakan luar negerinya terhadap pengungsi Ukraina tahun 2022-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Polandia terhadap penerimaan pengungsi Ukraina pada tahun 2022-2024

1.4.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru terhadap masyarakat yang berbentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini berada di lingkup Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Skripsi dalam program studi strata 1 program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis relaksasi kebijakan luar negeri Polandia terhadap pengungsi Ukraina Tahun 2022-2024.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah salah satu aspek penting dari strategi diplomatik suatu negara, dan para ahli telah memberikan banyak perspektif tentang bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dirumuskan dan dijalankan. Hans Morgenthau, seorang tokoh terkemuka dalam teori realisme politik, berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional yang didefinisikan dalam kerangka kekuatan dan keamanan. Morgenthau menekankan bahwa negara harus bertindak secara rasional untuk melindungi dan memajukan kepentingannya di arena internasional, seringkali melalui diplomasi, aliansi, dan, jika perlu, penggunaan kekuatan militer.

Di sisi lain, Joseph Nye, seorang ahli teori hubungan internasional yang dikenal dengan konsep "*soft power*," mengajukan bahwa kebijakan luar negeri modern tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi negara lain melalui budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang menarik (Nye, 2004). Nye berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan luar negeri seringkali lebih ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk membentuk preferensi dan perilaku negara lain tanpa paksaan, melalui diplomasi publik, bantuan internasional, dan kerja sama multilateral.

Kebijakan luar negeri merupakan seperangkat strategi dan tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut beberapa ahli, kebijakan luar negeri mencakup berbagai dimensi, termasuk politik, ekonomi, dan militer, yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Hans J. Morgenthau, misalnya, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya di arena internasional, melalui pengaturan keseimbangan kekuatan dan diplomasi. Sementara itu, James N. Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah proses yang mencerminkan bagaimana negara memandang dirinya sendiri dan lingkungan globalnya, serta bagaimana ia merespons perubahan-perubahan dalam lingkungan tersebut (Castles et al., 1984).

Dalam kajiannya, Eidenfalk menekankan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya didorong oleh kepentingan nasional, tetapi juga oleh nilai-nilai, identitas, dan persepsi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan (Eidenfalk, 2006). Eidenfalk berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi antara faktor internal, seperti budaya politik dan struktur pemerintahan, dengan faktor eksternal, seperti dinamika kekuatan global dan isu-isu internasional. Ia juga menyoroti pentingnya analisis terhadap aktor-aktor non-negara, seperti organisasi internasional dan kelompok-kelompok transnasional, dalam memahami bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan dan diimplementasikan.

Dari berbagai pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri adalah sebuah konsep yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Kebijakan luar negeri tidak hanya tentang

melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Pendekatan yang digunakan oleh Eidenfalk memperkaya pemahaman kita dengan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya produk dari kepentingan rasional, tetapi juga dari faktor-faktor non-material seperti persepsi dan identitas nasional.

Dalam perjalanannya, suatu negara seringkali melakukan perubahan terhadap kebijakannya. Relaksasi kebijakan luar negeri adalah proses pelonggaran atau penyesuaian strategi dan tindakan luar negeri suatu negara dalam menanggapi perubahan lingkungan internasional maupun domestik. Menurut Martin Eidenfalk, relaksasi kebijakan luar negeri tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan dinamika global, tetapi juga oleh faktor internal, seperti perubahan persepsi dan identitas nasional (Eidenfalk, 2006). Eidenfalk menekankan bahwa relaksasi kebijakan tersebut seringkali merupakan hasil dari refleksi mendalam oleh para pembuat kebijakan, yang mempertimbangkan kembali nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan nasional dalam konteks yang lebih luas dan dinamis.

Eidenfalk juga berpendapat bahwa dalam proses relaksasi kebijakan luar negeri, aktor-aktor non-negara memainkan peran penting. Mereka dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemerintah melalui advokasi, lobi, dan tekanan dari masyarakat internasional. Selain itu, relaksasi kebijakan luar negeri juga dapat dilihat sebagai cara negara untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional yang berkembang, serta untuk memperkuat posisi mereka di dalam komunitas global. Dengan demikian, menurut Eidenfalk, relaksasi kebijakan

luar negeri bukan hanya reaksi terhadap tekanan eksternal, tetapi juga cerminan dari dinamika internal dan evolusi identitas serta nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Di tingkat domestik, perubahan tersebut seringkali didorong oleh dinamika politik dalam negeri, termasuk pergantian kepemimpinan, tekanan dari kelompok-kelompok lobi, dan opini publik. Misalnya, apabila ada perubahan besar dalam komposisi pemerintahan atau meningkatnya tekanan dari masyarakat untuk mengambil sikap tertentu, hal tersebut dapat memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar selaras dengan kepentingan domestik yang baru (Eidenfalk, 2006).

Relaksasi kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi oleh faktor domestik yang beragam, termasuk peran partai politik, birokrasi, opini publik, kelompok berkepentingan, dan media massa. Partai politik dapat memainkan peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, terutama jika mereka memiliki mayoritas di parlemen atau eksekutif. Kebijakan luar negeri yang lebih moderat atau relaks dapat dihasilkan dari perubahan pemerintahan, di mana partai yang lebih terbuka terhadap diplomasi mengambil alih kekuasaan. Birokrasi, sebagai pelaksana kebijakan, juga memiliki pengaruh besar, karena para diplomat dan pejabat pemerintah bekerja secara langsung dengan aktor internasional dan dapat mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dalam hubungan internasional. Opini publik seringkali berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri, terutama di negara demokrasi, di mana pemerintah harus mempertimbangkan pandangan rakyat yang mungkin menginginkan hubungan internasional yang lebih damai dan kerja sama yang lebih kuat. Kelompok berkepentingan dan media massa juga

berkontribusi dengan mempengaruhi persepsi publik dan mengarahkan perhatian terhadap isu-isu tertentu, yang dapat mendorong pemerintah untuk melonggarkan kebijakan luar negeri mereka.

Selain faktor domestik, relaksasi kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor internasional, termasuk dinamika regional, global, hubungan bilateral, dan peran aktor non-negara. Dinamika regional bisa mendorong negara untuk melonggarkan kebijakan luar negeri mereka, terutama jika ada tekanan untuk menjaga stabilitas di kawasan atau meningkatkan kerja sama regional. Hubungan bilateral juga menjadi faktor penting, di mana hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara tertentu dapat memaksa sebuah negara untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka guna memperkuat aliansi atau menghindari konflik. Faktor global seperti perubahan tatanan dunia, peningkatan globalisasi, dan integrasi ekonomi juga mendorong negara untuk mengambil kebijakan luar negeri yang lebih terbuka dan adaptif. Aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan LSM, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dengan menekan pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih kooperatif di panggung internasional (Baszczak et al., 2022; Duszczuk & Kaczmarczyk, 2022).

Interaksi antara faktor domestik dan internasional seringkali menentukan sejauh mana suatu negara melonggarkan kebijakan luar negerinya. Misalnya, jika sebuah negara menghadapi tekanan domestik untuk menghindari konflik militer, serta tekanan internasional untuk berpartisipasi dalam perjanjian perdamaian, pemerintah mungkin akan memilih pendekatan yang lebih diplomatis dan terbuka. Dengan demikian, relaksasi kebijakan luar negeri tidak hanya merupakan hasil dari

keputusan politik internal, tetapi juga merupakan respons terhadap kondisi dan tekanan yang lebih luas dari komunitas internasional. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan seringkali menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara.

1.5.2 *Windows of Opportunity* (Jendela Kesempatan)

Konsep *Windows of Opportunity*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Eidenfalk (2006), mencakup periode ketika ada peluang yang lebih besar untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan karena adanya kondisi atau situasi yang mendukung. *Windows of opportunity* dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kepemimpinan politik, krisis internasional, perubahan opini publik, atau tekanan dari kelompok kepentingan (Eidenfalk, 2006).

Salah satu faktor yang disebut oleh Eidenfalk adalah perubahan kepemimpinan politik. Ketika pemimpin baru dengan pandangan atau prioritas kebijakan yang berbeda mengambil alih, mereka bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2006). Sebagai contoh, Eidenfalk menunjukkan bagaimana pemilihan presiden baru dapat membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Pemimpin baru mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan internasional atau prioritas kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, sehingga membuka jendela kesempatan untuk perubahan.

Eidenfalk juga menyoroti pentingnya krisis internasional dalam membuka *windows of opportunity*. Ketika terjadi krisis global atau regional, ada peluang bagi negara-negara untuk merespons dengan mengubah kebijakan luar negeri mereka.

Misalnya, peristiwa 9/11 menciptakan jendela kesempatan bagi Amerika Serikat untuk mengubah kebijakan luar negerinya dengan memfokuskan pada perang melawan terorisme. Dalam situasi krisis, ada tekanan yang lebih besar untuk bertindak, yang seringkali menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan. Opini publik juga memainkan peran penting dalam *windows of opportunity* menurut Eidenfalk (Eidenfalk, 2006). Ketika ada perubahan signifikan dalam pandangan publik mengenai isu tertentu, pembuat kebijakan merasa terdorong untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar sesuai dengan keinginan publik. Misalnya, meningkatnya kesadaran dan keprihatinan publik terhadap perubahan iklim telah mendorong banyak negara untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, Eidenfalk mencatat bahwa kelompok kepentingan dan lobi juga bisa menciptakan *windows of opportunity* (Eidenfalk, 2006). Kelompok berkepentingan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong perubahan kebijakan sesuai dengan agenda mereka. Mereka seringkali memiliki sumber daya dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan (Hermann, 1990). Sebagai contoh, lobi industri energi bisa mendorong kebijakan yang mendukung eksplorasi dan penggunaan energi fosil, sementara lobi lingkungan bisa mendorong kebijakan yang mendukung energi terbarukan.

Faktor-faktor yang dapat membuka "*windows of opportunity*" untuk perubahan kebijakan mencakup berbagai aspek eksternal dan internal. Secara eksternal, perubahan dalam dinamika geopolitik, seperti konflik regional atau

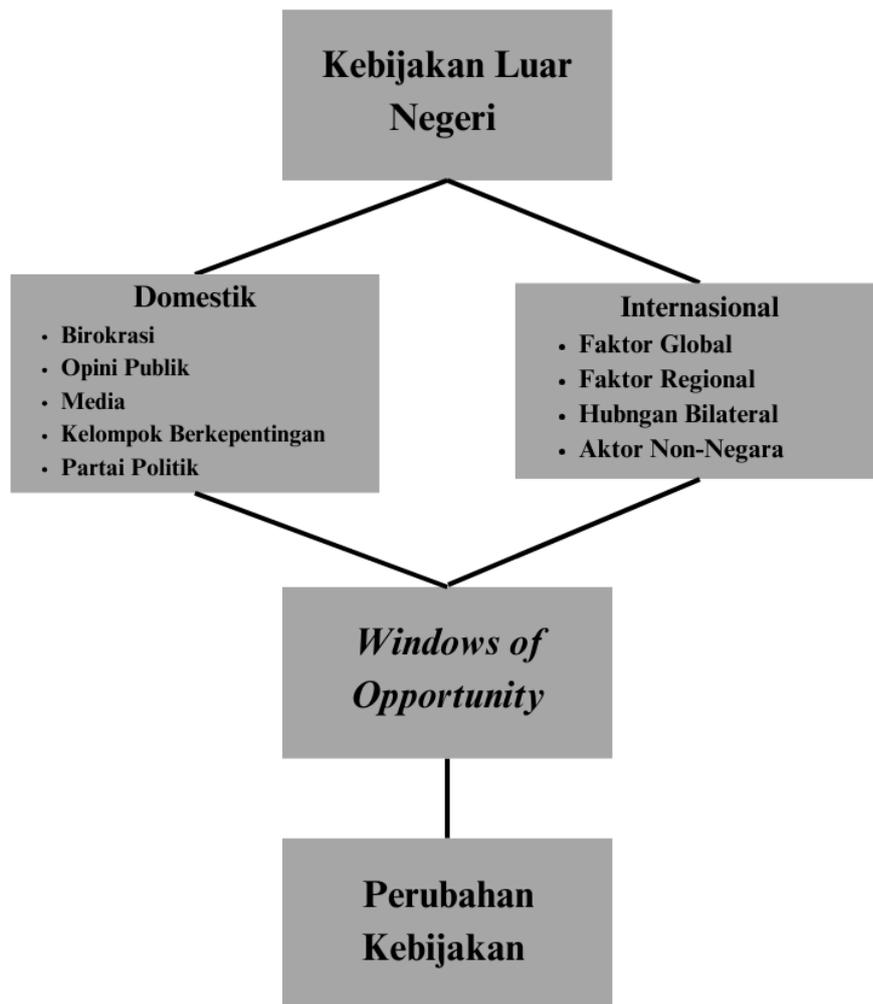
perubahan aliansi internasional (McKeever, 2020), dapat menciptakan peluang bagi negara untuk merumuskan ulang kebijakan luar negeri atau strategi militernya. Secara internal, perubahan dalam pemerintahan, seperti pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan, dapat memberikan dorongan bagi agenda kebijakan baru (Grossmann, 2012). Selain itu, tekanan dari kelompok kepentingan atau perubahan dalam opini publik juga dapat mempengaruhi pembukaan jendela peluang. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan konteks di mana perubahan kebijakan menjadi lebih mungkin dan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.

Skenario perubahan kebijakan melalui "*windows of opportunity*" seringkali melibatkan respons cepat dan adaptif dari pembuat kebijakan. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah mungkin melihat peluang untuk memperkenalkan reformasi struktural yang sebelumnya sulit dilaksanakan karena resistensi politik atau sosial (Haacke, 2021). Demikian pula, ancaman keamanan yang meningkat dapat mendorong perubahan kebijakan pertahanan atau keamanan yang lebih proaktif. Dalam kedua skenario tersebut, waktu adalah faktor kritis, karena jendela peluang seringkali bersifat sementara dan dapat tertutup dengan cepat jika situasi berubah atau jika momentum politik hilang.

Pengenalan dan pemanfaatan "*windows of opportunity*" membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan kemampuan untuk bertindak dengan cepat dan tegas (Hermann, 1990). Mereka menyarankan bahwa pembuat kebijakan harus selalu siap untuk mengenali tanda-tanda perubahan kondisi

eksternal dan internal, serta memiliki rencana yang siap untuk diimplementasikan ketika jendela peluang terbuka. Dengan strategi yang tepat, negara-negara dapat memanfaatkan momen-momen tersebut untuk melakukan perubahan kebijakan yang signifikan dan berkelanjutan, baik di bidang militer, ekonomi, maupun sosial.

1.6 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Relaksasi kebijakan luar negeri seringkali dipicu oleh berbagai faktor domestik dan internasional yang saling berinteraksi. Di tingkat domestik, faktor-

faktor seperti perubahan kepemimpinan, tekanan dari kelompok masyarakat atau industri tertentu, serta pergeseran opini publik memainkan peran penting. Misalnya, pergantian pemerintahan dengan agenda yang lebih moderat atau pro-diplomasi dapat membuka jalan bagi relaksasi kebijakan luar negeri. Selain itu, jika sektor ekonomi domestik, seperti perdagangan dan investasi, menghadapi tekanan yang memerlukan akses pasar internasional yang lebih luas, maka pemerintah mungkin terdorong untuk melonggarkan kebijakan luar negeri guna mendukung stabilitas ekonomi domestik.

Di sisi internasional, perubahan dalam tatanan global, aliansi strategis, serta krisis dan konflik internasional dapat memaksa negara untuk mempertimbangkan kembali pendekatan kebijakan luar negerinya. Ketegangan geopolitik yang mereda, perubahan kebijakan negara-negara besar, atau inisiatif diplomatik internasional yang menawarkan peluang kerja sama dapat menjadi katalisator bagi relaksasi kebijakan. Misalnya, jika ada perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar yang mempengaruhi keseimbangan kekuatan global, negara lain mungkin melihat tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan internasional mereka.

Windows of opportunity muncul ketika situasi domestik dan internasional menawarkan peluang yang ideal untuk melakukan relaksasi kebijakan. Bisa berupa meredanya konflik internasional, peluang ekonomi baru yang terbuka, atau inisiatif diplomatik yang menciptakan ruang bagi dialog dan kerja sama. Ketika faktor-faktor tersebut selaras, pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melonggarkan kebijakan luar negeri mereka. Misalnya, setelah periode ketegangan

geopolitik, munculnya kepemimpinan baru yang lebih terbuka terhadap dialog internasional dapat membuka jendela peluang bagi relaksasi kebijakan, memungkinkan negara untuk memperbaiki hubungan internasionalnya, mengamankan kepentingan nasional, dan meningkatkan stabilitas serta kemakmuran domestik.

1.7 Argumen Utama

Relaksasi kebijakan luar negeri Polandia terhadap pengungsi Ukraina dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor domestik dan internasional. faktor domestik yang pertama adalah birokrasi. Untuk mengakomodasi masuknya pengungsi secara besar-besaran, Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Polandia *Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji* (MSWiA) atau Kementerian Dalam Negeri dan Administrasi Polandia telah melakukan berbagai penyesuaian birokrasi untuk mempercepat proses administrasi, pemberian izin tinggal, dan akses ke layanan sosial. Ini menunjukkan respons cepat dan adaptif dari struktur birokrasi Polandia, yang menjadi salah satu argumen kuat untuk relaksasi kebijakan luar negeri terkait pengungsi.

Framing media dan opini publik juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Polandia. Media di Polandia seperti *Gazeta Wyborcza* dan media berita BBC secara umum telah memberikan liputan yang simpatik terhadap pengungsi Ukraina, menekankan sisi kemanusiaan dan solidaritas antara kedua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan erat. Liputan positif ini telah membentuk opini publik yang baik dan mendukung

penerimaan pengungsi. Dukungan dari masyarakat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melonggarkan kebijakan luar negerinya, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan keinginan warga negara.

Faktor domestik lainnya adalah peran kelompok masyarakat sipil dan LSM seperti *Polish Migration Forum Foundation* (PMFF) yang aktif dalam membantu pengungsi. Organisasi-organisasi ini tidak hanya menyediakan bantuan langsung, tetapi juga menekan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih proaktif dalam melonggarkan kebijakan luar negeri mereka. Kehadiran dan aktivitas kelompok-kelompok ini menunjukkan tingkat kepedulian dan solidaritas yang tinggi di antara warga Polandia, yang mendorong pemerintah untuk merespons dengan kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif.

Dan yang terakhir adalah faktor dari Partai Politik Polandia. *Prawo i Sprawiedliwość* atau Partai Hukum dan Keadilan (PiS) berideologi kanan kuat dan memiliki sejarah menolak pengungsi seperti pengungsi Suriah, tetapi semenjak invasi Rusia ke Ukraina, PiS mulai mendukung penerimaan pengungsi Ukraina. Partai Koalisi Sipil (KO) Sebagai partai oposisi utama, KO cenderung lebih mendukung kebijakan yang ramah terhadap pengungsi dan menekankan pentingnya solidaritas internasional. Mereka mengkritik kebijakan PiS yang dianggap terlalu ketat dan tidak manusiawi. Tidak hanya itu, Partai Kiri dan Jalan Ketiga juga mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan humanis terhadap pengungsi. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dan terkoordinasi dengan Uni Eropa untuk menangani krisis pengungsi.

Di tingkat internasional, UNHCR dalam faktor global memiliki pengaruh dalam Polandia mengubah kebijakannya yaitu melalui advokasi, bantuan keuangan, dan kampanye kesadaran publik. UNHCR mendorong Polandia untuk mengadopsi kebijakan yang komprehensif dan suportif bagi para pengungsi Ukraina. Upaya yang dilakukan oleh UNHCR tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga untuk menjadi dasar untuk integrasi jangka panjang untuk para pengungsi ke dalam masyarakat Polandia. Faktor regional memiliki dampak signifikan terhadap keputusan Polandia untuk melonggarkan kebijakan luar negerinya terhadap pengungsi Ukraina. Sebagai anggota Uni Eropa, Polandia berada di bawah pengaruh kebijakan dan rekomendasi regional yang mendukung penerimaan dan perlindungan pengungsi. Uni Eropa telah memberikan panduan dan dukungan finansial kepada negara-negara anggotanya untuk mengatasi krisis pengungsi, yang mendorong Polandia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel dalam kebijakan luar negerinya.

Selain itu, hubungan bilateral antara Polandia dan Ukraina juga berperan penting. Sejarah panjang hubungan baik antara kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi dan budaya, menciptakan landasan yang kuat untuk dukungan timbal balik. Dalam konteks krisis pengungsi, Polandia melihat peluang untuk memperkuat hubungan bilateral dengan menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap Ukraina. Aktor non-negara seperti pengungsi Ukraina juga memberikan tekanan tambahan melalui advokasi dan bantuan kemanusiaan, mendorong Polandia untuk melonggarkan kebijakan luar negerinya demi kepentingan kemanusiaan dan stabilitas regional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan eksplanatif untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Polandia terhadap penerimaan pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia tahun 2022 dengan menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri dan *Windows of Opportunity*. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara dua atau lebih gejala, fenomena, atau variabel (Meleong, 1989).

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan Polandia pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini karena pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina ditahun 2022 dan perubahan undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Andrzej Duda ditahun yang sama, penelitian ini dibatasi ditahun 2024 karena keterbatasan data dan juga tahun pengerjaan skripsi.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang akan digunakan adalah melalui dokumen resmi, termasuk kebijakan publik, pidato politik, laporan resmi pemerintah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana pengungsi Ukraina dan isu-isu keamanan dikonstruksi dalam dokumen-dokumen tersebut, serta bagaimana hal itu memengaruhi pembentukan dan relaksasi kebijakan penerimaan pengungsi.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang relevan dapat dikembangkan dengan merujuk pada teori perubahan kebijakan yang dikemukakan oleh Eidenfalk. Eidenfalk menekankan pentingnya analisis kontekstual dalam memahami perubahan kebijakan luar negeri, terutama melalui identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal serta aktor-aktor kunci yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Teknik analisis kualitatif yang dapat digunakan dalam artikel ini meliputi analisis konten terhadap dokumen kebijakan resmi, pidato pejabat tinggi, dan pernyataan publik dari aktor-aktor politik utama Polandia. Dengan menganalisis konten ini, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan perubahan kebijakan, seperti retorika yang digunakan untuk mbingkai pengungsi Ukraina, justifikasi terhadap relaksasi kebijakan, serta respons terhadap tekanan dari Uni Eropa dan organisasi internasional. Teknik penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai Perspektif-perspektif serta dapat membantu memahami konteks sosial dimana fenomena tersebut terjadi (Meleong, 1989). Metode ini dapat sangat membantu penulis untuk memahami tren, pola, hubungan ketertarikan pada data (Yakin, 2023).

1.8.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian,

Bab II membahas tentang faktor-faktor domestik dan internasional yang menjadi penyebab dari perubahan kebijakan negara Polandia

Bab III Penjelasan faktor dari berubahnya kebijakan Luar Negeri Polandia dengan menggunakan teori *Windows of opportunity* (Jendela Kesempatan)

Bab IV membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang dapat diberikan sebagai koreksi penelitian ini